

STRATEGI PENGUATAN PERAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA KENDALBULUR, KABUPATEN TULUNGAGUNG

Riya Irawati¹, Reza Pirgianta Ginting², Reny Asmiyanti³, Neneng Sri Rahayu⁴

^{1,2,3,4}Politeknik STIA LAN Jakarta

¹riyairawati@gmail.com; ²rezapirgianta@gmail.com; ³reny.asmiyanti@gmail.com;

⁴neneng.rdown@gmail.com

Diterima: Januari 2023; Disetujui: Oktober 2023

Abstract. Based on the composite food security index, Tulungagung Regency is classified as good or highly resilient to vulnerabilities. However, there are still issues within the institutional framework of Kendalbulur Village, particularly the need for more human resources in village governance. This study aims to illustrate the role of village institutions in managing food security and the strategies for strengthening the governance institutions. Data collection for this research was conducted through document review, interviews, and field observations. The analysis includes an analysis of village potential, village governance institutions, village budget management, regulations, village development, village autonomy, and strategies for strengthening the role of village institutions in improving food security using SWOT analysis and the IFAS-EFAS matrix. The results of this study demonstrate the crucial role of village institutions in managing food security. Furthermore, the Rapid Growth Strategy is the strategy for strengthening the role of Kendalbulur Village institutions in improving food security. Therefore, Kendalbulur Village needs to consistently implement regulations and institutional support to enhance agriculture, fishery, livestock farming, and tourism while maximizing the potential of these sectors.

Keywords: food improvement strategy, institutions, village autonomy.

Abstraksi. Kabupaten Tulungagung berdasarkan indeks ketahanan pangan komposit termasuk dalam klasifikasi baik atau sangat tahan terhadap kerentanan. Namun masih terdapat permasalahan dalam kelembagaan Desa Kendalbulur, diantaranya kurangnya sumber daya manusia di bidang pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kelembagaan desa dalam mengelola ketahanan pangan dan strategi penguatan kelembagaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen, wawancara, dan pengamatan di lapangan. Analisis yang dilakukan meliputi analisis potensi desa, kelembagaan pemerintah desa, pengelolaan anggaran desa, regulasi, pengembangan desa, otonomi desa, dan strategi penguatan peran kelembagaan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan menggunakan instrument SWOT dan matriks IFAS-EFAS. Hasil penelitian ini menunjukkan peran kelembagaan desa dalam mengelola ketahanan pangan sangat penting. Lebih lanjut, strategi penguatan peran kelembagaan Desa Kendalbulur dalam meningkatkan ketahanan pangan yaitu Rapid Growth Strategy. Oleh karena itu Desa Kendalbulur perlu konsisten mengimplementasikan regulasi dan dukungan kelembagaan yang ada dalam peningkatan pertanian dan budidaya perikanan serta memaksimalkan potensi pertanian, perikanan, peternakan dan wisata.

Kata kunci: kelembagaan, otonomi desa, strategi peningkatan ketahanan pangan.

PENDAHULUAN

Kepuasan kebutuhan pangan merupakan hak fundamental manusia yang tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan merupakan elemen penting dalam pembentukan sumber

daya manusia yang berkualitas. Ketahanan pangan tercapai ketika semua orang, pada setiap waktu, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang memadai terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi

yang memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat (FAO, 2009). Mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan pangan harus memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, swasembada, dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut Chaireni dkk. (2020) menjelaskan bahwa ketahanan pangan yang berkelanjutan merujuk pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun sistem ketahanan pangan yang mengandalkan beragam sumber daya bahan pangan, lembaga, dan budaya lokal guna memastikan ketersediaan pangan dan nutrisi dalam jumlah dan kualitas yang memadai dengan harga yang terjangkau. Kebijakan tersebut juga memperhatikan peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan produksi yang diatur melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Keadaan ketahanan pangan dan nutrisi di dunia masih mengalami kemunduran dalam pencapaian target Zero Hunger 2030. Sebagai contoh Afrika menanggung tanggungan paling tinggi, dimana satu dari lima orang di Afrika atau 20,2% dari populasi menghadapi kelaparan pada tahun 2022 (FAO, 2022).

Kebijakan dan tindakan yang terintegrasi secara holistik dibutuhkan untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Faktor utama ketahanan pangan, diantaranya ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan (FAO, 2006). Pengelolaan ketahanan pangan melibatkan berbagai lembaga yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu: menjamin ketersediaan,

aksesibilitas, dan keberlanjutan produksi pangan.

Kabupaten Tulungagung berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2021 termasuk dalam klasifikasi baik atau sangat tahan terhadap kerentanan dimana berada pada peringkat ke 34 dari 416 kabupaten dengan IKP sebesar 85,15, walaupun sebaran pangan belum merata (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2022). Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung memiliki areal pertanian yang luas dengan produksi berupa tanaman padi, palawija, bawang merah, tembakau, dan hasil perkebunan lainnya. Mata pencaharian utama penduduk sebagai petani dan kaum tani juga turut andil dalam hal tersebut.

Dari informasi yang ditelusuri, adanya keterbatasan sumberdaya manusia dalam lembaga desa, praktik pemerintahan desa yang belum efisien, dan penggalan potensi desa yang masih minim menjadikan peran kelembagaan dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Kendalbulur masih belum optimal. Kondisi ini belum selaras dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, dalam hal ini otonomi Desa Kendalbulur, dimana kemandirian kewenangan pemerintahan, dukungan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi isu utama yang perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah. Sektor yang terdampak akibat lemahnya kelembagaan desa diantaranya sektor pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Ketahanan pangan akan sulit untuk dapat dicapai apabila kelembagaan desa belum kuat dan sumber daya manusia masih

terbatas. Hal tersebut senada dengan penelitian Arimbawa dkk (2018) yang menyebutkan bahwa lembaga yang berperan dalam pemenuhan ketahanan pangan adalah pemerintah desa dan lembaga yang berperan dalam peningkatan sumber daya manusia diantaranya kelompok tani, penyuluh pertanian, keluarga hingga komunitas petani.

Pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam keberhasilan suatu program pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas dan tingkat demokrasi, kapasitas pemerintah dalam hal lembaga, sumber daya, dan organisasi, dinamika kewenangan otonomi daerah antara pemerintah pusat dan daerah, kesadaran kritis dari para aktor demokrasi seperti birokrasi, parlemen, masyarakat sipil, dan media massa, serta pandangan terbuka terhadap pemerintahan dan hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil (Barniat, 2019).

Mewujudkan otonomi desa tidak lepas dari penyelenggaraan pemerintah desa, peran kepala desa, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang mendukung dalam meningkatkan ketahanan pangan. Kelembagaan Pemerintah Desa Kendalbulur diantaranya kepala desa dan perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, bumdes, dan kerjasama antar daerah. Lembaga tersebut berjalan secara aktif dan memiliki pengaruh masing-masing dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di desa. Adanya pergantian kepemimpinan kepala desa pada tahun 2018 menjadi Bapak Anang Mustofa Kepala Desa Kendalbulur turut menjadi pendorong Desa Kendalbulur berhasil dalam pelaksana terbaik 10 program PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga) melalui 5 (lima) inovasi Desa Kendalbulur

(Humas Desa Kendalbulur, 2022a). Selain itu dalam lomba desa dan kelurahan terbaik Tahun 2022, Desa Kendalbulur memenangkan juara 1 dalam lomba desa dengan penilaian, diantaranya tata kelola pemerintahan desa, tertib administrasi dan hasil kinerja selama 2 tahun ke belakang, serta kinerja lembaga desa lainnya, seperti lembaga adat desa, BUMDesa, LPM, PKK, Karang Taruna, Satlinmas, Forum Anak Desa, bahkan pokmas perikanan, pertanian maupun peternak (Humas Desa Kendalbulur, 2022b).

Konsep ketahanan pangan dimulai dari pemberdayaan kelompok-kelompok pangan dalam kelembagaan pemerintah desa dengan memaksimalkan potensi pertanian, peternakan, perikanan, dan pemberdayaan. Pemberdayaan kelompok pangan berhubungan erat dengan *entrepreneur* sehingga perlu banyak diciptakan kegiatan wirausaha dan UMKM yang memberikan nilai tambah ekonomi atau pembangunan non fisik. Peningkatan peran lembaga-lembaga di tingkat desa sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik.

Berbeda dengan penelitian ini, Muhtarom (2016) lebih membahas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa di Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan LPM dalam pembangunan desa yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, penelitian Tinov dan Handoko (2016) lebih menitikberatkan pada penguatan kelembagaan desa dalam mewujudkan otonomi desa di desa-desa pesisir.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini akan lebih menganalisis peran kelembagaan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui strategi

penguatan peran kelembagaan desa dengan analisis SWOT dan IFAS EFAS di Desa Kendalbulur, Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami serta mengeksplorasi permasalahan yang berhubungan dengan fenomena sosial melalui pengumpulan informasi yang detail serta mendalam dengan mengaitkan bermacam sumber dengan metode wawancara, observasi, dan studi literatur dengan data-data yang lain.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Kendalbulur, Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung, dan perwakilan kelompok tani. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan telaah dokumen, jurnal, laporan, serta dokumen yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, teknik analisis SWOT, dan matriks IFAS-EFAS.

Tahapan analisis mencakup analisis potensi desa, kelembagaan pemerintah desa, pengelolaan anggaran desa, regulasi, pengembangan desa, otonomi desa, dan strategi penguatan peran kelembagaan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Analisis Deskriptif Kualitatif

Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan metode untuk menganalisis, menggambarkan, dan merangkum berbagai kondisi dan situasi yang ditemukan dalam data yang dikumpulkan melalui wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang

diteliti di lapangan (Winartha, 2006). Teknik ini diterapkan untuk menganalisis potensi desa, kelembagaan pemerintah desa, pengelolaan anggaran desa, regulasi, pengembangan desa, dan analisis otonomi desa.

Analisis SWOT

SWOT menurut Siagian (2005) menggambarkan instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan benar, serta dikenal secara luas bahwa “SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Kesempatan) dan *Threats* (Ancaman). Menurut Kotler dan Amstrong (2008), analisis SWOT didefinisikan sebagai keseluruhan kekuatan, kelemahan guna memperhitungkan peluang dan ancaman. Hal tersebut mempunyai dampak yang luar biasa dalam merancang strategi keberhasilan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari faktor internal serta kesempatan dan ancaman yang berasal dari faktor eksternal dari peran kelembagaan Pemerintah Desa Kendalbulur dalam peningkatan ketahanan pangan di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu.

Penyusunan analisis ini didasarkan pada hasil analisis sebelumnya dan hasil wawancara ke perangkat desa Kendalbulur dan Bappeda Kabupaten Tulungagung dan hasil pengamatan di lapangan terkait potensi-potensi desa Kendalbulur yang mendukung ketahanan pangan.

Matriks IFAS-EFAS

Analisis IFAS-EFAS menganalisis kondisi matriks internal dan eksternal berdasarkan bobot dan peringkat dari analisis strategi penguatan peran kelembagaan pemerintahan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan yang sudah dilakukan melalui analisis SWOT. Bobot

setiap aspek SWOT dinilai menggunakan metode perankingan 0-1. Seluruh bobot di setiap faktor jika dijumlah tidak boleh melebihi nilai 1. Setelah melalui proses pembobotan lalu dilakukan proses rating yang menunjukkan tingkat kepentingan tiap aspek. Pembagian nilai rating dibagi menjadi 4, yaitu: sangat rendah = 1, rendah = 2, sedang = 3 dan tinggi = 4 (Rangkuti, 2015). Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT yang dilanjutkan dengan analisis IFAS EFAS akan dapat diukur koefisien (X) = Kekuatan – Kelemahan dan koefisien (Y) = Peluang – Ancaman sehingga dapat diketahui strategi peningkatan peran kelembagaan desa dalam peningkatan ketahanan pangan sesuai kuadran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Desa dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Desa Kendalbulur sebagai desa inovatif mempunyai beragam potensi desa. Potensi tersebut diantaranya sektor pertanian, sektor peternakan, desa wisata melalui wisata *Nangkula Park*, edukasi kampung kambing, kampung patin, kampung tembakau, dan edukasi budaya sinau sinden.

Pada sektor pertanian terdapat program kampung tembakau dengan luasan 105 Ha lahan tembakau dan 4 Ha lahan pembibitan, yang dikembangkan oleh 25 KK. Selain itu juga terdapat pengembangan tanaman sayur dan hortikultura yang memiliki 4 Kelompok Tani (Poktan) tembakau. Pada sektor perikanan terdapat program Kampung Patin dengan luasan kolam yang dikembangkan sebanyak 10 Ha dengan jumlah 22 KK, serta terdapat 2 Kelompok Pembudidayaan Ikan (Pokdakan) Patin dan 1 Kelompok Pengolahan Ikan patin (Poklahsar). Pada sektor peternakan terdapat kampung kambing dengan jumlah 1.129 ekor, yang dikembangkan oleh 215 Kepala Keluarga

(KK), serta terdapat 7 Kelompok Peternak Kambing Epe dan 1 Kelompok Peternak Kambing Etawa. Pada sektor wisata terdapat destinasi wisata *Nangkula Park* dan paket eduwisata. Pemberdayaan pada ketiga program tersebut dapat dikatakan sudah mulai berjalan ditandai dengan adanya kelompok-kelompok pembudidayaan.

Dalam kegiatan produksi dan pemasaran hasil-hasil pertanian, sudah tidak ada tengkulak dan bebas dari sistem ijon. Hasil tembakau dikirimkan ke Sumatera dan Kalimantan, untuk pangsa Tulungagung dan sekitarnya dijual ke Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, dan daerah pegunungan lainnya. Pada sektor perikanan, pendistribusian patin dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu pedagang besar atau ke pabrik. Pabrik dan pedagang memberikan dukungan dengan pengadaan bibit, pellet hingga penjualan hasil perikanan, dimana saat ini terdapat 22 KK yang bermitra dengan pabrik pakan. Pada sektor peternakan, pendistribusian hasil ternak dilakukan langsung kepada pedagang. Penjualan pada musim haji meningkat dan juga penjualan kambing sudah melalui sistem daring. Pada sektor pariwisata, *Nangkula Park* adalah taman rekreasi dan sarana olahraga yang berada di area persawahan Desa Kendalbulur. Meski bersisian langsung dengan sawah, tetapi taman ini memberikan daya tarik wisatawan dan dijadikan sebagai area pemasaran pertanian dan peternakan. Wisatawan dapat menikmati serunya wisata swafoto, kuliner, rekreasi keluarga, hingga olahraga ceria dalam satu tempat.

Kelembagaan Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 mengamanatkan bahwa desa melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat, hak keturunan dan adat desa, atau dengan kata lain melaksanakan otonomi desa itu sendiri. Selain itu, adanya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) memberikan dukungan penganggaran bagi pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian dan memenuhi infrastruktur penunjangnya.

Selaras dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kelembagaan di Desa Kendalbulur meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Posyandu Balita dan Lansia, PKK, Satlinmas, Karang Taruna Wibawa Karsa, RT/RW, Lembaga Anak Desa (FAD), dan forum kemasyarakatan desa lainnya, antara lain Gapoktan/ Kelompok Petani, Kelompok Peternak, Kelompok Pembudidayaan Ikan patin (Pokdakan), Kelompok perempuan Tani (KWT), Kelompok Pengolahan Ikan Patin (Poklahsar) Kim “Layang Ndeso” (KLN), forum adat desa: Sindhung Warih, Genduri Bukak Sawah, dan Kirab Tumpeng, dan BUMDes Larasati. Sarana Desa Kendalbulur juga memenuhi jumlah minimal jenis sarana desa yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pernyataannya, Kepala Desa Kedalbulur Anang Mustofa menyatakan bahwa “Kelembagaan Desa Kendalbulur masih menghadapi masalah, termasuk sumber daya manusia perangkat desa yang masih kurang, praktik pemerintahan desa yang belum sepenuhnya efisien, dan penggalan potensi desa yang belum maksimal, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat, baik orang tua maupun generasi muda”. Senada dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat yang kurang dalam proses perencanaan dan

pengendalian pembangunan menjadi kendala dalam kinerja lembaga pemberdayaan desa (Chotimah dkk., 2019).

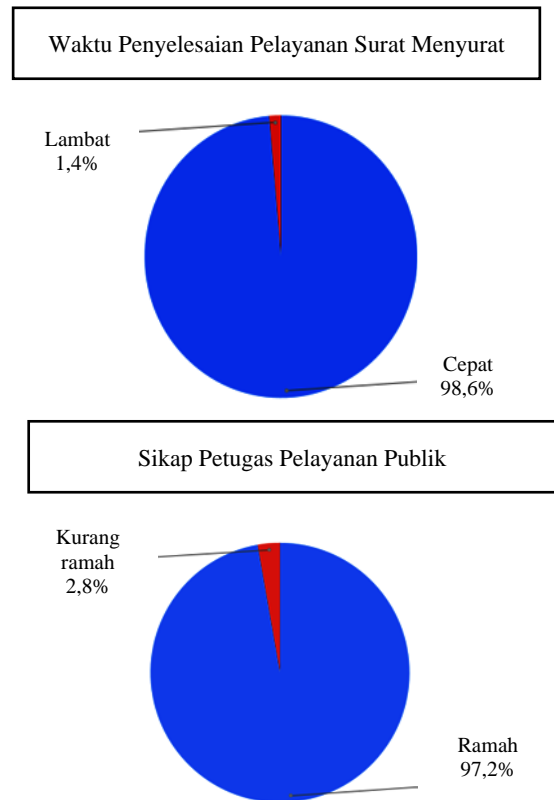
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa berhak mengusulkan struktur organisasi dalam pelaksanaan tugasnya dan berkewajiban mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa. Kepala Desa Kendalbulur saat ini dikepalai oleh Bapak Anang sejak 2019 hingga 2025. Selama kurun waktu tersebut, banyak kemajuan pengembangan di Desa Kendalbulur, yang merupakan pengejawantahan visi Kepala Desa, yaitu “Desa Kendalbulur menjadi prioritas pembangunan desa dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang SIAP (Santun, Ikhlas, Amanah dan Profesional) dalam rangka mewujudkan Desa Kendalbulur yang sejahtera, adil, makmur dan guyub rukun”. Desa Kendalbulur sudah melaksanakan reformasi atau perbaikan pelayanan kepada masyarakat desa, yang ditandai dengan adanya perubahan dari 2019-2022. Hal tersebut didukung oleh konsistensi Kepala Desa dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2019 – 2025 secara konsisten. Dalam RPJMDes 2019 – 2025, telah dituangkan visi misi kades, identifikasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, identifikasi potensi masalah di desa, sekaligus penyalarsan dengan program prioritas RPJM Nasional dan RPJM Daerah. Dengan demikian, prioritas penggunaan dana desa dapat tepat sasaran seperti digitalisasi desa, pengembangan produk unggulan desa, penguatan BUMDes serta desa wisata (Putra, 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kendalbulur tahun 2022, dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kepala Desa Kendalbulur dibantu oleh BPD, Kepala Seksi (Kepala Seksi Pelayanan,

Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan), Sekretaris Desa (Kepala TU dan Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan, serta Kepala Dusun Kendalbulur, Kepala Dusun Genting, dan Kepala Dusun Rongganan. Kepala desa harus mampu memimpin pemerintahan desa dan mengelola informasi yang berkaitan dengan desa, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat (Rumkel dkk., 2020).

Berdasarkan Gambar 1, kinerja Pemerintahan Desa Kendalbulur yang mencakup pelayanan persuratan dan sikap petugas dalam melayani sudah cukup baik. Hal ini juga didukung oleh kinerja BPD di Desa Kendalbulur yang tergolong cukup baik, terutama jika dilihat dari sudah banyaknya peraturan desa yang dikeluarkan, misalnya untuk mendukung ketahanan pangan, dan kegiatan-kegiatan desa dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kegiatan yang diprakarsai oleh BPD saat ini beragam, mencakup pertemuan desa dan kunjungan lapangan.

Sejalan dengan hal di atas, berdasarkan penelitian Syafitri dan Suriani (2019), kepemimpinan sangat berperan dalam pembangunan desa dimana kepemimpinan yang handal memiliki tiga variabel, diantaranya pemimpin sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator, yang dapat menentukan sukses atau tidaknya peran kepemimpinan dalam suatu pembangunan desa. Kepala Desa dan BPD di Desa Kendalbulur memiliki peran signifikan, yaitu membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan, mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa.



Gambar 1. Survei Kinerja Pemerintahan Desa Kendalbulur
Sumber: Mustofa, 2022

Terdapat juga lembaga adat desa “Sindhung Warih” yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat Desa dengan kegiatan kemasyarakatan yang mendorong kerukunan dan gotong royong warga, termasuk dalam mempersiapkan tanam pangan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya Genduri Bukak Sawah, Sinau Sinden, dan Kirap Tumpeng.

Peran PKK juga turut mendukung peran ibu-ibu di Desa Kendalbulur. Inovasi PKK yang dilakukan diantaranya “Kami Dansa Bali”, yang fokus untuk mengurangi angka kematian ibu, balita, dan menurunkan stunting; “Pos Paman” untuk menjaga keamanan pangan terhindar dari penggunaan bahan-bahan yang berbahaya; dan “Dasawisma Tanggap Bencana” dengan membentuk lingkungan yang siap siaga

terhadap bencana alam dan non alam. Selain itu, juga terdapat gerakan ibu-ibu menanam sayur bunga dan toga di tiap lingkungan RT bersama Kelompok Wanita Tani.

Pengelolaan Anggaran Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 bahwa Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, yang diutamakan untuk a) Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling sebanyak 25% dari anggaran dana desa; b) dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari anggaran dana desa; c) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran dana desa, termasuk pembangunan lumbung pangan desa; dan d) dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada BUMD, program kesehatan termasuk penanganan stunting dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain. Pendanaan anggaran dana desa yang cukup besar tersebut wajib digunakan paling tidak untuk program pangan dan hewan untuk mempersiapkan desa-desa menghadapi krisis pangan secepat mungkin.

Berdasarkan Peraturan Desa Kendalbulur Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, bahwa anggaran pendapatan belanja desa sebagai wujud pengelolaan desa dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat desa. Adapun anggaran Belanja Desa Kendalbulur tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.893.116.000, yang terdiri dari Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan

Masyarakat, Bencana, Darurat & Mendesak Desa. Persentase anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian & peternakan, peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan perempuan perlindungan anak & keluarga hanya sekitar 13,6% dari total keseluruhan. Adapun anggaran untuk pembinaan masyarakat dengan kegiatan ketentraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat, kebudayaan & keagamaan, kepemudaan & olahraga, kelembagaan masyarakat sebesar 6,5%. Dari data tersebut, terlihat bahwa persentase untuk kegiatan yang berkaitan ketahanan masih tergolong kecil (kurang dari 20%) sehingga perlu penambahan alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.

Desa Kendalbulur telah melakukan Program Ketahanan Pangan sejak tahun 2019 sehingga alokasi anggaran Desa Kendalbulur terkait dengan ketahanan pangan tidak hanya berasal dari dana desa, tetapi juga berasal dari hasil kolaborasi CSR dengan pihak swasta. Desa Kendalbulur bermitra dengan Bank Jatim untuk permodalan dimana masyarakat desa tidak perlu memberikan jaminan dalam proses permodalan untuk mendapatkan dana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih cepat berkembang. Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala yang dirasakan, serta memaksimalkan upaya untuk mencapai ketahanan pangan di desa Kendalbulur.

Pada tahun yang sama BUMDes Larasati Kendalbulur membentuk divisi baru, yaitu Divisi Pertanian. Divisi unit usaha ini yaitu menanam daun jeruk purut dan millet beras organik dengan adanya dukungan wilayah desa yang sebagian besar terdiri dari lahan pertanian dan tambak.

Perkembangan unit usaha BUMDes Larasati Kendalbulur diantaranya: 1) Unit Usaha Simpan Pinjam bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk memperluas kegiatan pertaniannya. Selain simpan pinjam, badan ini melayani semua jenis transaksi keuangan, dan bekerja sama dengan Bank BRI melalui BRILink. 2) Unit usaha Pertanian. Unit usaha ini dijalankan dengan cara memperdagangkan daun jeruk purut. Selama satu tahun berturut-turut, BUMDes memiliki rencana kerja untuk melaksanakan intensifikasi pertanian guna meningkatkan produksi pertanian. 3). Unit Usaha Minapadi Organik yang menggabungkan model pertanian padi dengan budidaya air tawar yang juga digunakan sebagai sarana penunjang unit wisata desa. Dengan adanya model pertanian ini, maka pemeliharaan dan perawatan padi maupun aneka jenis ikan diberlakukan tanpa pestisida kimia maupun hormon pertumbuhan. 4) Unit Usaha Wisata *Nangkula Park*. Wisata *Nangkula Park* berupa lapangan olahraga, taman bunga, resto, budidaya ikan minapadi, candi bokoh, mainan anak, dan sarana rekreasi lainnya yang dilengkapi atraksi wisata (jaranan, tari reog khas Tulungagung, wayang, tarian kolosal dan pertunjukan lainnya). Wisata *Nangkula Park* merupakan sarana untuk memasarkan produk *home industry* dari hasil

pertanian, perikanan, dan peternakan serta menarik wisatawan untuk datang ke Desakendalbulur. 5) Unit Usaha Kios *Online*. Digitalisasi mulai dikembangkan di Desa Kendalbulur, dimana sebanyak 55 UMKM (toko kelontong, pengrajin) dan *home industry* masuk ke dalam unit usaha daring. Selain itu, ketersediaan *wifi* di seluruh area Desa Kendalbulur serta lokasi yang dekat dengan pusat kota menunjang dalam digitalisasi penjualan produk pangan. Lebih lanjut, konsep pariwisata yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadikan BUMDes sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat dan lembaga yang dapat meningkatkan pendapatan anggaran desa (PAD).

Berdasarkan Undang-Undang Desa, dana desa dapat diartikan sebagai dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk pengelolaan desa. Penggunaan alokasi desa, yaitu 30% untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana desa dan pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan (Pengadaan.web.id, 2020).

Tabel 1. Ringkasan APBD Desa Kendalbulur 2019 – 2021

2019	2020	2021
2.220.399.080	2.256.332.148,97	2.197.701.975

Sumber: Mustofa, 2021

Berdasarkan APBD Desa Kendalbulur 2019 – 2021 (Tabel 1), jumlah alokasi anggaran mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah alokasi anggaran meningkat mencapai 1,62%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,60%

dimana alokasi untuk pelaksanaan pembangunan tergolong besar. Kondisi ini memerlukan perencanaan program anggaran yang terarah dan pelaksanaan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai kaidah akuntabilitas pembangunan yang didasarkan

pada kebutuhan pembangunan masyarakat Desa Kendalbulur.

Berdasarkan laporan keuangan Desa Kendalbulur, pada tahun 2021 total APBD Desa sebesar Rp. 2.197.701.975 yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, BUMDes, dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Tabel 1 nilai APBD fluktuatif dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan namun pada tahun 2021 justru mengalami penurunan.

Regulasi dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kendalbulur, dijelaskan bahwa terdapat beberapa potensi Desa Kendalbulur. Pada sektor pertanian terdapat tanaman tembakau gagang sisi rejab dan tanaman sayur dan hortikultura, pada sektor perikanan terdapat budidaya ikan patin dan budidaya ikan hias, dan pada sektor peternakan terdapat budidaya kambing epe dan etawa. Potensi di atas didukung dengan diterbitkannya Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Salah satu kelembagaan masyarakat desa adalah kelompok tani, contohnya Kelompok Tani Padi, Kelompok Tani Tembakau, Pokdakan Patin, serta Kelompok Peternak Kambing Epe dan Etawa. Pemberdayaan kelompok-kelompok tani inilah yang akan berperan penting dalam peningkatan ketahanan pangan desa, dan didukung dengan program ketahanan pangan desa, yaitu kampung patin, kampung kambing, kampung tembakau dan lain-lain.

Peran pemerintah desa hadir dalam pemenuhan sarana dan prasarana desa untuk menunjang produktivitas kelompok tani. Salah satu contoh penggunaan anggaran untuk prasarana adalah ketika sedang kemarau dan tata kelola air tidak bagus,

pemerintah desa hadir dengan pengadaan mesin pompa disel untuk memompa air dari sungai. Disamping pemenuhan sarana dan prasarana, pemerintah desa juga membantu dengan menjaga tata kelola limbah dengan mengeluarkan Peraturan Desa Kendalbulur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Salah satu tujuannya adalah melindungi wilayah Desa Kendalbulur dari kerusakan lingkungan hidup. Para petani ikan wajib membuat kolam pembuangan untuk menampung limbah ternak ikan dan membuangnya ke saluran pembuangan akhir, untuk selanjutnya melakukan penataan dan normalisasi sungai. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat kendala dalam pemberdayaan kelompok tani. Salah satunya dikarenakan pengelolaan pertanian yang masih konvensional oleh kelompok tani, misalnya belum menerapkan pertanian organik sehingga masih menggunakan pestisida dan bahan kimia yang menghasilkan limbah, adaptasi teknologi pertanian yang masih kurang dan masih sekitar 60% kelompok tani yang sudah memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu berdasarkan wawancara, dalam peningkatan ketahanan pangan ditemui beberapa permasalahan, antara lain: a) pemasaran hasil pertanian belum memadai, b). kualitas produksi kurang, c). akses pasar belum ada, d). penggalan potensi desa belum maksimal, e). kurangnya teknologi tepat guna, dan f). jual beli daring (*e-commerce*) yang mengambil pangsa pasar pangan, dan g). serangan hama terutama hama tikus pada tanaman padi.

Permasalahan di atas dapat menjadi kelemahan internal dalam peningkatan ketahanan pangan di Desa Kendalbulur, antara lain: a) masih kurangnya SDM dalam pemberdayaan masyarakat, b) masyarakat yang masih belum mengenal teknologi, c)

beberapa petani dan pembudidaya yang masih kesulitan dalam mengelola keuangan sehingga tidak dapat mengembalikan pinjaman ke BUMDes, dan d) serangan hama tikus pada tanaman padi yang menyerang justru saat akan musim panen. Sementara itu, ancaman dari luar dalam peningkatan ketahanan pangan dapat berupa maraknya jual beli daring (*e-commerce*) yang mengambil pangsa pasar pangan dan sistem kemitraan pendanaan yang belum terbina secara maksimal dengan pemerintah desa dan pihak terkait.

Pengembangan Desa Kendalbulur

Untuk mendukung ketahanan pangan diperlukan strategi untuk mengatasi hambatan dalam pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini serupa dengan penelitian Chairani dkk., (2020). yang menjelaskan tantangan ataupun hambatan yang dihadapi, meliputi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, luas lahan pertanian yang semakin berkurang, pemenuhan komoditas pangan yang masih bergantung pada impor, dan permasalahan adopsi teknologi dalam meningkatkan produktivitas yang masih terhambat.

Selain lahan pertanian yang semakin berkurang, adanya persaingan dalam pemasaran produk pertanian juga menjadi permasalahan lainnya. Dalam hal ini peran adopsi teknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan menjadi penting. Konsep pembangunan dan pengembangan desa digital dalam kajiannya menjelaskan keunggulan desa digital, yaitu dapat meningkatkan kemampuan usaha desa setempat dalam meningkatkan produksi, pemasaran, reputasi, dan juga efisiensi ekonomi, sehingga mampu bersaing dengan pengusaha nasional, dan bahkan pedagang dalam skala global (Nugroho, 2021).

Peran adopsi teknologi dan digitalisasi tidak dapat dipisahkan sebagai *tools* dalam pengembangan wilayah. Desa tidak bisa menolak perkembangan digitalisasi. Desa harus beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi. Visi Desa Kendalbulur sudah mengusung digitalisasi administrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan digitalisasi ekonomi dan interaksi sosial. Adanya website www.kendalbulur.com, www.nangkulapark.com dan aplikasi berbasis Smpel Desa turut memasarkan sektor pangan dengan layanan di dalam aplikasi berupa pasar desa, grosir desa, dan mitra BUMDes. Masyarakat bisa melakukan penjualan hasil-hasil pertanian melalui aplikasi tersebut sehingga lebih efisien, efektif dan berdaya guna.

Kekuatan dalam peningkatan ketahanan pangan juga dibangun dari sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang cukup berkembang di Desa Kendalbulur, aktifnya kelembagaan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat, serta media pemasaran yang cukup menarik konsumen pangan yang dikelola oleh Humas Desa Kendalbulur. Selain itu adanya potensi wisata Nangkula Park yang menarik wisatawan luar dapat menjadi kesempatan untuk menarik potensi dari luar dalam pengembangan ketahanan pangan (Humas Desa Kendalbulur, 2022c).

Otonomi Desa

Terkait otonomi daerah untuk pemerintah desa, masyarakat desa merupakan *backbone* dalam pembangunan desa. Desa ke depan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya alam sendiri, sumber daya manusia, merumuskan kebijakan desa terkait, dan merencanakan hingga melaksanakan penganggaran sesuai kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, desa juga dituntut untuk menciptakan kreativitas masyarakat dalam

mengembangkan desa sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomis yang akhirnya dinikmati oleh masyarakat desa. Dengan demikian, masyarakat berangsur-angsur dapat memenuhi kebutuhan sendiri atau membentuk “desa swadaya”.

Serupa dengan kesimpulan konsepsi otonomi desa yang diungkapkan oleh Barniat (2019), bahwa dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yakni: variabel penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga; faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat; variabel letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; variabel ketersediaan sarana prasarana, antara lain sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa; variabel sosial budaya berupa kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat; dan variabel kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk mata pencaharian masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, jumlah penduduk Desa Kendalbulur sudah memenuhi syarat terbentuk suatu desa dimana terdiri dari 3.976 jiwa atau sekitar 795 kepala keluarga (BPS Kabupaten Tulungagung, 2022). Untuk sarana dan prasarana, sarana transportasi atau akses jalan di Desa Kendalbulur memiliki kondisi baik kurang lebih 2.450 m, rusak kurang lebih 1.550 m, jalan makadam kurang lebih 450 m yang perlu pembenahan, atau masih 50% jalan memerlukan perbaikan. Selain itu, kondisi drainase banyak yang tersumbat dan belum ada drainase untuk limbah sisa hasil produksi peternakan. Dalam hal pemasaran produk masih mengandalkan pasar tradisional (Humas Desa Kendalbulur, 2022d).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kendalbulur, kelembagaan BPD, LPMD, Karang Taruna, Gapoktan, PKK, Posyandu (Kader Posyandu) eksis dan memiliki pengaruh dalam menggerakkan masyarakat. Keaktifan kelembagaan yang ada juga berperan dalam meningkatkan produktivitas sektor ekonomi pada bidang pertanian dan peternakan di Desa Kendalbulur.

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Kendalbulur sudah mampu melakukan otonomi desa, khususnya dalam pengelolaan ketahanan pangan. Dalam pengelolaan potensi desa, baik berupa tembakau, perikanan, hortikultura dan sayuran, maupun peternakan, sudah terbentuk antara produksi-pengolahan dan pemasaran yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Desa Kendalbulur melalui kelompok-kelompok perikanan, pertanian, dan kelompok pembudidaya lainnya. Senada dengan hal tersebut, Pamungkas (2019) menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengurus kepentingan masyarakat sehingga pelibatan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara terintegrasi.

Dalam dukungan kebijakan sudah ditetapkan beberapa peraturan desa terkait kelembagaan dan pelestarian hidup yang dapat meminimalisir dampak lingkungan dari pengolahan budidaya perikanan dan peternakan. Namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal. Lindawaty (2012) dalam penelitiannya menyebutkan pelaksanaan otonomi Indonesia dapat melihat perkembangan dari Cina, dimana kemandirian desa di Cina dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa,

penguatan kelembagaan desa (perangkat desa) dan kelembagaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat yang mendapat dukungan penuh, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta keaktifan perangkat desa dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan otonomi desa (Lestari, 2015).

Tabel 2. Analisis Strategi Penguatan Peran Kelembagaan Desa dalam Peningkatan Ketahanan Pangan (S-W-O-T)

<i>Strength/ Kekuatan</i>	<i>Weakness/ Kelemahan</i>	<i>Opportunities/ Peluang</i>	<i>Threats/ Tantangan</i>
a. Dukungan pendanaan dana desa, BUMDes, dan CSR	a. Masih kurangnya SDM dalam pemberdayaan masyarakat	a. Potensi wisata <i>Nangkula Park</i> yang menarik wisatawan luar	a. Jual beli daring (<i>e-commerce</i>) yang mengambil pangsa pasar pangan
b. Kepala daerah yang memiliki inovasi dan terjun aktif ke masyarakat	b. Masyarakat pada kelompok-kelompok petani dan pembudidaya yang masih kurang melek teknologi	b. Adanya peran pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam pengembangan Desa Kendalbulur	b. Sistem kemitraan pendanaan yang belum terbina secara maksimal dengan pemerintah desa dan pihak terkait
c. Dukungan regulasi perdes, pengaturan kelembagaan dan pangan	c. Beberapa petani dan pembudidaya tidak dapat mengembalikan pinjaman ke BUMDes	c. Adanya UU desa yang mendorong untuk desa mengatur kewenangannya	c. Prasarana pembuangan limbah untuk budidaya patin belum ada
d. Sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan yang cukup berkembang	d. Serangan hama tikus pada tanaman padi		
e. Aktifnya kelembagaan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat			
f. Media pemasaran yang cukup menarik konsumen pangan			

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan Tabel 2 dilakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan peran kelembagaan desa dalam peningkatan ketahanan pangan. Dari uraian di atas, masih diperlukan perbaikan dalam penyelenggaraan otonomi desa, diantaranya perbaikan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi, khususnya pada komoditas pertanian dan peternakan. Belum tersedianya prasarana pembuangan limbah untuk budidaya perikanan dapat menjadi salah satu ancaman dalam peningkatan ketahanan pangan.

Otonomi desa yang kuat akan membentuk otonomi daerah yang kuat pula

sehingga peran desa sebagai akar rumput pelaksanaan otonomi terkecil memiliki peran yang sangat penting. Adapun kekuatan internal dalam peningkatan ketahanan pangan dalam lingkup otonomi desa Kendalbulur diantaranya dukungan pendanaan dana desa, BUMDes dan CSR, kepala daerah yang memiliki inovasi dan dukungan peraturan desa terkait kelembagaan dan pangan.

Strategi Penguatan Peran Kelembagaan Desa

SWOT merupakan hasil dari analisis terkait potensi desa, analisis kelembagaan pemerintah desa, analisis pengelolaan

anggaran desa, analisa regulasi dalam terkait alokasi dana desa. Hadi (2013) dalam mendukung ketahanan pangan, analisis penelitiannya menggunakan konsep analisis pengembangan desa Kendalbulur, serta SWOT dalam meningkatkan mutu lembaga analisis otonomi desa hubungannya dengan madrasah dengan tujuan menentukan otonomi daerah untuk pemerintah desa dan strategi pengembangan mutu lembaga.

Tabel 3. Analisis Strategi Penguatan Peran Kelembagaan Desa dalam Peningkatan Ketahanan Pangan (*Strength - Opportunity, Weakness - Opportunity, Strength - Treat dan Weakness-Treat*)

Eksternal	Internal	Strength (S)	Weakness (W)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pendanaan dana desa, BUMDes, dan CSR • Kepala daerah yang memiliki inovasi dan terjun aktif ke masyarakat • Dukungan regulasi perdes, pengaturan kelembagaan dan pangan • Sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang cukup berkembang • Aktifnya kelembagaan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat • Media pemasaran yang cukup menarik konsumen pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya SDM dalam pemberdayaan masyarakat • Masyarakat pada kelompok-kelompok tani dan pembudidaya yang masih kurang melek teknologi • Beberapa petani dan pembudidaya tidak dapat mengembalikan pinjaman ke BUMDes • Serangan hama tikus pada tanaman padi 	
	Opportunities (O)	Strategi SO	Strategi WO
	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi wisata <i>Nangkula Park</i> yang menarik wisatawan luar • Adanya peran pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam pengembangan Desa Kendalbulur • Adanya UU desa yang mendorong untuk desa mengatur kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan kelembagaan yang ada saat ini dan meningkatkan peran pemberdayaan kelompok-kelompok tani dan masyarakat desa • Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang mendukung Desa Kendalbulur sebagai desa berketahanan pangan, seperti Perdes Pengaturan Kelembagaan, Perdes Pengelolaan Pertanian dan Perdes Pemberdayaan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan kelompok-kelompok tani, kelompok pembudidaya ikan, dan peternak dalam usaha peningkatan kualitas hasil, diversifikasi hasil dan gangguan hama • Mendorong edukasi penggunaan IT dalam pemasaran hasil – hasil pertanian, peternakan dan perikanan
	Threats (T)	Strategi ST	Strategi WT
	<ul style="list-style-type: none"> • Jual beli daring (<i>e-commerce</i>) yang mengambil pangsa pasar pangan • Sistem kemitraan pendanaan yang belum terbina secara maksimal dengan pemerintah desa dan pihak terkait • Prasarana pembuangan limbah untuk budidaya patin yang belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan peran BUMDes dalam mendukung pemasaran hasil-hasil bahan baku pangan dan produk olahannya melalui media daring • Menjalin kerjasama dengan Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan prasarana pembuangan limbah budidaya patin • Membangun sistem kemitraan pendanaan yang tidak memberatkan kelompok tani, kelompok budiya perikanan dan kelompok peternak

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Mengacu pada Tabel 3 dilakukan analisis dari kondisi eksternal dan internal sehingga menghasilkan strategi – strategi diantaranya strategi memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang (Strategi SO), strategi untuk meminimalkan kelemahan dengan

peluang yang ada (Strategi WO), strategi untuk mengurangi ancaman dengan memaksimalkan kekuatan (ST) dan strategi untuk mengurangi kelemahan dan ancaman (WT).

Tabel 4. Matriks *Internal Strategic Factor Analysis Summary* (IFAS) Strategi Penguatan Peran Kelembagaan Desa dalam Peningkatan Ketahanan Pangan

<i>Strength/Kekuatan</i>	Bobot	Rating	Bobot X Rating
a. Dukungan pendanaan dana desa, BUMDes, dan CSR	0,06	3	0,18
b. Kepala daerah yang memiliki inovasi dan terjun aktif ke masyarakat	0,08	4	0,32
c. Dukungan regulasi perdes pengaturan kelembagaan dan pangan	0,05	3	0,15
d. Sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan yang cukup berkembang	0,06	4	0,24
e. Aktifnya kelembagaan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat	0,05	3	0,15
f. Media pemasaran yang cukup menarik konsumen pangan	0,05	2	0,1
Total			1,14
<i>Weakness/ Kelemahan</i>			
a. Masih kurangnya SDM dalam pemberdayaan masyarakat	0,06	4	0,24
b. Masyarakat pada kelompok-kelompok tani dan pembudidaya yang masih kurang melek teknologi	0,06	3	0,18
c. Beberapa petani dan pembudidaya tidak dapat mengembalikan pinjaman ke BUMDes	0,05	4	0,2
Total			0,62

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Analisis IFAS-EFAS adalah alat untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal peran kelembagaan desa dalam peningkatan ketahanan pangan dalam bentuk matriks dengan pembobotan dan pemerinkatan. *Internal Strategic Factor Analysis Summary* (IFAS) digunakan untuk menghitung pembobotan faktor-faktor internal (Tabel 4), sedangkan *Eksternal Strategic Factor Analysis Summary* (EFAS) adalah alat untuk menghitung pembobotan eksternal (Tabel 5).

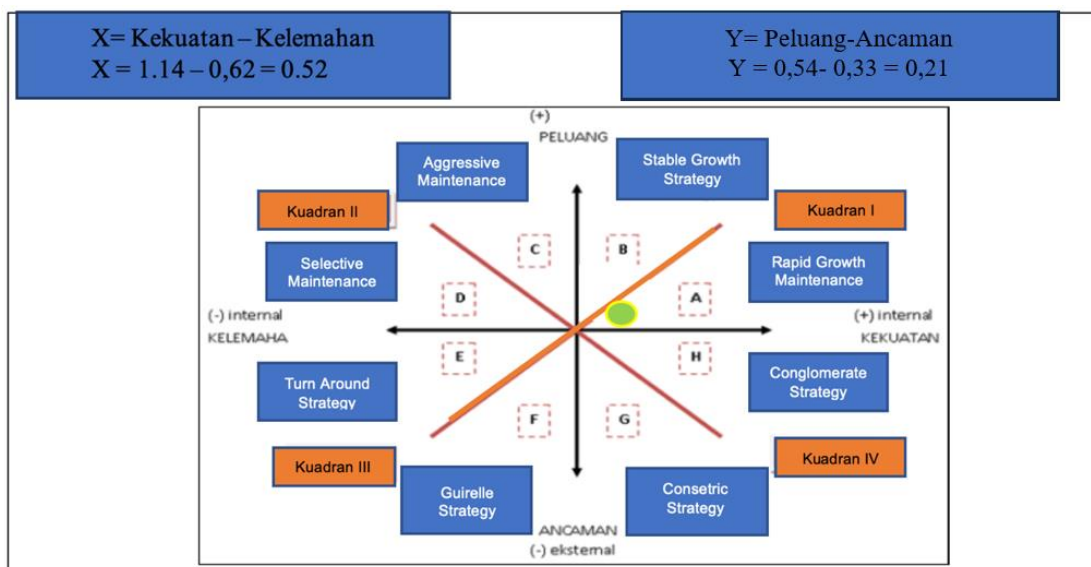
Hasil pembobotan menghasilkan koefisien X dan Y, dimana nilai X = 0,52 yang berarti faktor internal kekuatan lebih besar dari kelemahan. Sementara itu, nilai Y = 0,21 yang menjelaskan bahwa faktor

eksternal untuk peluang lebih besar dari tantangan yang dihadapi dalam strategi penguatan peran kelembagaan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dengan demikian, hasil koefisien X dan Y berada pada kuadran I A yaitu Rapid Growth Strategy (Gambar 2) yang berarti bahwa strategi pertumbuhan yang agresif dengan memanfaatkan ketahanan pangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan konsisten mengimplementasikan regulasi dan dukungan kelembagaan yang ada dalam peningkatan pertanian dan budidaya perikanan, mengencarkan promosi dan sistem pemasaran, serta pengembangan pengolahan hasil pertanian dan budidaya perikanan.

Tabel 5. Matriks *Eksternal Strategic Factor Analysis Summary* (EFAS) Strategi Penguatan Peran Kelembagaan Desa dalam Peningkatan Ketahanan Pangan

<i>Opportunities/ Peluang</i>	Bobot	Rating	Bobot Y Rating
a. Potensi wisata <i>Nangkula Park</i> yang menarik wisatawan luar	0,05	3	0,15
b. Adanya peran pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam pengembangan Desa Kendalbulur	0,06	3	0,18
c. Adanya UU desa yang mendorong untuk desa mengatur kewenangannya	0,07	3	0,21
Total			0,54
<i>Threats/ Tantangan</i>	Bobot	Rating	Bobot Y Rating
a. Jual beli daring (<i>e-commerce</i>) yang mengambil pangsa pasar pangan	0,03	2	0,06
b. Sistem kemitraan pendanaan yang belum terbina secara maksimal dengan pemerintah desa dan pihak terkait	0,04	3	0,12
c. Prasarana pembuangan limbah untuk budidaya patin	0,05	3	0,15
Total			0,33

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 2. Perhitungan Koefisien (X) dan (Y) EFAS dan IFAS Strategi Penguatan Peran Kelembagaan Desa dalam Peningkatan Ketahanan Pangan
Sumber: Hasil Analisis, 2023

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan matriks IFAS-EFAS Analisis SWOT didapatkan pada kuadran I A yaitu *Rapid Growth Strategy*. Hal ini berarti bahwa kinerja kelembagaan Desa Kendalbulur cenderung meningkat, tetapi seiring itu kelembagaan Pemerintah Desa Kendalbulur perlu mengembangkan peluang dari luar untuk

peningkatan mutu dan jenis produksi, serta pemasaran dari hasil pertanian pangan. Oleh karena itu Desa Kendalbulur perlu memaksimalkan potensi pertanian, perikanan, peternakan dan wisata dan menyusun strategi peningkatan peran kelembagaan Desa Kendalbulur.

Strategi-strategi yang perlu dilakukan diantaranya: (1) mempertahankan kelembagaan yang ada saat ini dan

meningkatkan peran pemberdayaan kelompok-kelompok tani dan masyarakat desa; (2) menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang mendukung Desa Kendalbulur sebagai desa berketahanan pangan, seperti peraturan desa pengaturan kelembagaan, peraturan desa pengelolaan pertanian dan peraturan desa pemberdayaan masyarakat; (3) melakukan peningkatan SDM dengan pelatihan kelompok-kelompok tani, kelompok pembudidaya ikan dan peternak dalam usaha peningkatan kualitas hasil; (4) diversifikasi hasil dan gangguan hama; (5) mendorong edukasi penggunaan IT dalam pemasaran hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan; (6) penguatan peran BUMDes dalam mendukung pemasaran hasil-hasil bahan baku pangan dan produk olahannya melalui media daring; (7)

membangun sistem kemitraan pendanaan yang tidak memberatkan kelompok tani, kelompok budiaya perikanan, dan kelompok peternak; (8) menjalin kerjasama dengan Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur; dan (9) membangun prasarana pembuangan limbah budidaya patin.

Saran yang diusulkan untuk menguatkan peran kelembagaan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Kendalbulur, yaitu: perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan komitmen pimpinan, terutama kepala desa, untuk mengimplementasikan strategi dengan penerbitan peraturan desa yang mendukung Desa Kendalbulur sebagai Desa Berketahanan Pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbawa, P., Rahmah, N., & Limi, M. A. (2018). Meningkatkan Akses Pangan dan Sumberdaya Manusia Melalui Peran Kelembagaan Tani. *Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Ichsan Gorontalo* 22(24). 21-31.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2022). *Laporan Kinerja 2021 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan*. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1). 20-33.
- BPS Kabupaten Tulungagung. (2022). *Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2022*. Tulungagung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung.
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*. 1(2). 70-79.
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103–113.
- FAO. (2006). *Policy Brief: Food Security - Issue 2, June 2006*. Rome: FAO.
- FAO. (2009). *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action*. Rome: FAO.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2022). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable*. Rome: FAO.

- Hadi, A. (2013). Konsep Analisis SWOT dalam Peningkatan Mutu Lembaga Madrasah. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 14(1), 143–158.
- Humas Desa Kendalbulur. (2022a). *5 Program Inovasi Desa Menjadi Poin Penting dalam Pemaparan Desa Kendalbulur di Lomba Desa Tingkat Provinsi Jatim*. Diakses pada 5 Juli 2023, dari <https://kendalbulur.com/2022/05/19/2674/>.
- Humas Desa Kendalbulur . (2022b). *Menyabet 2 Kejuaraan di Lomba Tingkat Propinsi Jatim, Sejarah Baru Desa Kendalbulur di Hut Ri Ke 77*. Diakses pada 5 Juli 2023, dari <https://kendalbulur.com/2022/08/25/menyabet-2-kejuaraan-di-lomba-tingkat-propinsi-jatim-sejarah-baru-desa-kendalbulur-di-hut-ri-ke-77/>.
- Humas Desa Kendalbulur. (2022c). *Nangkula Park Wisata Edukasi*. Diakses pada 5 Juli 2023, dari website www.kendalbulur.com, www.nangkulapark.com.
- Humas Desa Kendalbulur. (2022d). *Profil Wilayah Desa*. Diakses pada 5 Juli 2023, dari <https://kendalbulur.com/profil/profil-wilayah-des/>.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295. Jakarta: Menteri Keuangan RI.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran Terjemahan*. Edisi 12, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, E. R. (2015). Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pijanau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 466-479.
- Lindawaty, D. S. (2012). Dukungan Pemerintah terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina. *Politica*, 3 (2), 243–272.
- Muhtarom, A. (2016). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 1(3). 181-204.
- Mustofa, A. (2019). *RPJM Desa Tahun 2019-2025*. Tulungagung: Pemerintah Desa Kendalbulur.
- Mustofa, A. (2021). *Realisasi APBDES 2021*. Tulungagung: Pemerintah Desa Kendalbulur.
- Mustofa, A. (2022). *Survei Kepuasan Pelayanan Publik Desa Kendalbulur*. Tulungagung : Pemerintah Desa Kendalbulur.
- Nugroho, L. (2021). *Konsep Pembangunan dan Pengembangan Desa Digital. Pengantar Manajemen Potensi Desa: Aku Yakin Desaku Punya Sejuta Potensi*. Bojonegoro: CV Agrapana Media.
- Pamungkas, B.A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*. 2(2). 212-213.
- Pemerintah Desa Kendalbulur. (2019). *Peraturan Desa Kendalbulur Nomor 09 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa*. Tulungagung: Pemerintah Desa Kendalbulur.
- Pemerintah Desa Kendalbulur. (2020). *Peraturan Desa Kendalbulur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa*. Tulungagung: Pemerintah Desa Kendalbulur.
- Pemerintah Desa Kendalbulur. (2021a). *Peraturan Desa Kendalbulur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*. Tulungagung: Pemerintah Desa Kendalbulur.

- Pemerintah Desa Kendalbulur. (2021b). *Peraturan Desa Kendalbulur Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022*. Tulungagung: Pemerintah Desa Kendalbulur.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pengadaan.web.id. (2020). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. Diakses pada 4 Mei 2023, dari <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>.
- Putra, ASA (2023) Desa Kendalbulur Raih Banyak Prestasi Berkat Konsistensi RPJMDES 2019-2025. Diakses pada 4 Agustus 2023, dari <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/76792595/desa-kendalbulur-raih-banyak-prestasi-berkat-konsistensi-rpjm-des-2019-2025>.
- Rangkuti, F. (2015). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rumkel, L., Sam, B., Chairul, M., & Umanailo, B. (2020). Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Administratio Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. 11(1). 23-27.
- Siagian, S P. (2005). *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafitri, I. & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *Publika*. 5(1), 44-54.
- Tinov, M., & Handoko, T. (2016). Penguatan Kelembagaan Desa dalam Mewujudkan Otonomi di Desa-desa Pesisir: Studi di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 15 (26), 98-111.
- Winartha, I M., (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.